

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Dalam telaah-telaah ilmu sosial, bahasa menempati posisi yang sangat penting. Posisi penting bahasa tersebut, semakin diakui terutama setelah munculnya pascamodern dan pascastrukturalisme dalam kancan filsafat dan epistemologi modern. Bahasa dan praktik kebahasaan tidak lagi dipahami dalam konteks atau perspektif konvensional, yakni sebagai alat dan medium netral yang dipakai untuk menjelaskan kenyataan sosial-politik. Namun, semakin disadari bahwa bahasa tampil sebagai representasi dari pergelaran berbagai kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, bahasa kemudian diposisikan pula sebagai salah satu ruang tempat konflik-konflik berbagai kepentingan, kekuatan, kekuasaan, bahkan praktik hegemoni. Dalam pandangan hidup orang Athena abad ke-5, bahasa menjadi instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang konkret dan praktis. Bahasa dianggap sebagai senjata ampuh dalam percaturan politik tingkat tinggi.

Bahasa dapat dipahami sebagai salah satu simbol kultural yang berfungsi memberikan orientasi, komunikasi, dan pengendalian diri kepada manusia. Sejauh bahasa adalah proses produksi simbolis, ia tak terpisahkan dari maksud sang pembicara. Dengan kata lain, subjektivitas memainkan perananan penting dalam penyampaian informasi dari sang pembicara.

Sekaitan dengan hal tersebut, Bourdieu (dalam Piliang, 2003) mengemukakan bahwa bahasa dan simbol tidak dapat dilepaskan dari relasi

kekuasaan. Artinya, ia dapat digunakan sedemikian rupa sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Ketika bahasa dan simbol digunakan sebagai alat defensif pelanggaran kekuasaan, khususnya dengan cara manipulasi data dan tanda sehingga menghasilkan distorsi makna, maka bahasa telah menjadi alat kekerasan simbolik, yakni sebuah bentuk kekerasan berupa pemaksaan simbolik yang halus.

Lyotard (dalam Piliang, 2003) mengemukakan terdapat berbagai bentuk "permainan" di dalam sebuah masyarakat atau negara, baik permainan politik, hukum, media, dan sebagainya, yang masing-masing memiliki aturan main dan permainan bahasanya sendiri. Ketika permainan tersebut diintervensi oleh kepentingan kekuasaan, maka hal yang muncul adalah kepentingan kekuasaan itu sendiri.

Bahasa juga menjadi cermin ideologi. Malah tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ideologi membentuk dan dibentuk oleh bahasa. Melalui ideologi orang memberikan makna pada realitas tertentu dengan menggunakan bahasa tertentu yang dirumuskan melalui sebuah kata dan kalimat, sehingga membentuk realitas tertentu. Dengan kata lain, bahasa bukan sekadar alat komunikasi untuk memaknai suatu realitas objektif semata. Namun bahasa juga merupakan kegiatan sosial, bukan sesuatu yang netral dan konsisten, melainkan partisipan sosial yang dapat dikonstruksi dan direkonstruksi, serta di-*setting* untuk membentuk gagasan dan tindakan seseorang.

Menurut Foucault (dalam Yulianus, 2008), dalam kehidupan nyata, disadari atau tidak, bahwa di dalam bahasa terkandung pergulatan dan pertarungan

kepentingan ideologis. Sebab dipandang sebagai sesuatu yang tidak netral dan tidak universal; bahasa menjadi terikat oleh waktu, tempat, dan konteks pergulatan historis politiknya sendiri-sendiri. Sehingga bahasalah yang melahirkan wacana atau *discourse* sebagai sesuatu yang niscaya bersifat politik.

Ibrahim (2004) mengemukakan media sebagai komoditas secara ideologis telah menggeser fungsinya dari corong "rintihan suci suara rakyat" menjadi "nyanyian sunyi suara penguasa atau pengusaha". Oleh karena itu, media dapat menjelma menjadi ancaman, jika logika pesan media tunduk kepada sekelompok orang yang disinyalir akan mendistorsi bahasa atau pesan media untuk mengendalikan pikiran khalayak dalam memahami realitas. Dalam pengertian yang lain, dengan beban-beban ideologis tersebut, realitas yang tampil di media seringkali bukanlah pendeskripsian otentisitas dunia itu sendiri, tetapi justru realitas yang telah terdistorsi atau sudah "berwajah" kepalsuan. Padahal, atmosfer budaya yang memuat realitas palsu inilah, yang seringkali membawa kesalahpahaman di antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat.

Everett M. Roger (dalam Eriyanto, 2001) mengemukakan bahwa "media bukanlah entitas yang netral, tetapi bisa dikuasai oleh kelompok dominan." Berdasarkan pernyataan Everett M. Roger dapat dipahami bahwa media memiliki kemungkinan besar dikuasai oleh kelompok berkuasa atau kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan.

Ada beberapa pertanyaan yang muncul dari sebuah paradigma kritis, yaitu siapa yang mengontrol media? Kenapa ia mengontrol? Keuntungan apa yang bisa diambil dengan kontrol tersebut? Kelompok mana yang tidak dominan dan

menjadi objek pengontrolan?

Mengapa pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting? Karena paradigma kritis ini percaya bahwa media adalah sarana di mana kelompok dominan dapat mengontrol kelompok yang tidak dominan, bahkan memarjinalkan mereka dengan menguasai dan mengontrol media. Sehingga jawaban yang diharapkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah adanya kekuatan-kekuatan yang berbeda dalam masyarakat yang mengontrol suatu proses komunikasi.

Menurut Horkheimer (dalam Eriyanto, 2001), salah satu sifat dasar dari teori kritis adalah selalu curiga dan mempertanyakan kondisi masyarakat dewasa ini. Karena kondisi masyarakat yang kelihatannya produktif dan bagus tersebut sesungguhnya terselubung struktur masyarakat yang menindas dan menipu kesadaran khalayak.

Ideologi dalam sebuah wacana dipahami sebagai representasi dan konstruksi sosial yang dibangun melalui teks. Ideologi dapat dipandang dalam banyak aspek, namun yang terpenting dalam konteks analisis wacana kritis adalah bahwa sebuah teks tidak bersifat netral, teks diproduksi dengan maksud-maksud atau tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk representasi konstruksi sosial, dominasi individu atau kelompok, atau mungkin hegemoni individu dan kelompok. Dalam praktiknya, ideologi selalu dibangun oleh kelompok hegemonik dan berkuasa. Dengan demikian, ideologi erat kaitannya dengan bahasa yang digunakan dan direkayasa. Oleh karena itu, penting untuk membahas bagaimana konstruksi bahasa dalam format kekuasaan sebab ideologi disampaikan melalui bahasa. Di ranah tersebut, bahasa menjadi alat yang efektif

dalam menyampaikan ideologi baik personal maupun komunal. Bahkan, bahasa menjadi bagian dari suprastruktur kekuasaan dan alat untuk melanggengkan kekuasaan.

Di zaman Orde Baru, praktik-praktik tersebut lumrah adanya. Bahasa dipolitisasi sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan politik waktu itu. Politisasi bahasa memang sudah menjadi karakter dari penggunaan bahasa kekuasaan Orde Baru. Penguasa Orde Baru telah menjadikan bahasa sebagai subordinat dari kekuasaan politik yang tercermin dalam pembangunan. Bahasa telah direkayasa sebagai komoditas politik demi kepentingan kelompok-kelompok dominan. Munculnya istilah-istilah yang secara makna dikudeta oleh para penguasa Orde Baru telah mengubah pandangan dan cara berpikir masyarakat Indonesia yang menjadi subjek bahasa. Kata "rawan pangan" berbeda makna dengan "kelaparan" karena dalam pikiran kita tidak pernah hadir bayangan orang-orang yang kelaparan karena tidak ada yang bisa dimakan.

Bahasa-bahasa propaganda semacam itu seringkali dijumpai dalam tulisan-tulisan di media cetak. Media cetak sebagai media yang aksesibilitasnya mudah menjadi sarana yang strategis untuk berbagai kepentingan. Oleh karena itu, melihat objektivitas sebuah teks atau wacana dalam media cetak memerlukan daya analisis yang kuat dari pembaca.

Salah satu media cetak yang paling produktif menggunakan bahasa Indonesia ragam tulis ialah surat kabar atau koran. Informasi yang disampaikan melalui surat kabar atau koran itu sasarannya adalah pembaca dari semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diperhatikan penggunaan dan pemakaian

bahasa Indonesia hubungannya dengan entitas makna dan informasi yang ingin disampaikan.

Salah satu media cetak yang berskala nasional adalah koran *Kompas*. Koran *Kompas* merupakan media cetak nasional yang memiliki jaringan distribusi yang kuat. Artinya, koran ini dapat dijumpai di seluruh wilayah Nusantara. Oleh karena itu, koran *Kompas* dianggap memiliki posisi strategis jika digunakan sebagai media untuk mempropagandakan sesuatu.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerbitan Yogyakarta atau LP3Y (dalam Dhakidae, 1996), mengungkapkan bahwa 46 % informasi yang dipublikasikan dalam surat kabar-surat kabar Indonesia berasal dari sumber-sumber pemerintah, 39 % dari masyarakat, komunitas politik dan bisnis, dan sisanya sebanyak 15 % berasal dari berbagai sumber.

Penelitian yang berkaitan dengan bahasa dan politik ataupun sebaliknya politik dan bahasa pada surat kabar atau koran masih minim. Adapun penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anshori (2009). Dalam penelitiannya yang bertajuk "Penggunaan Bahasa Politik dalam Pemberitaan Pilgub Jabar 2008 pada H.U. *Pikiran Rakyat*" mengungkapkan tentang intensitas penggunaan bahasa politik dalam pemberitaan pilgub Jabar 2008 pada H. U. *Pikiran Rakyat*, struktur teks pemberitaan pilgub Jabar 2008 pada H. U. *Pikiran Rakyat*, ideologi yang dibangun dalam pemberitaan pilgub Jabar 2008 pada H. U. *Pikiran Rakyat*, dan penyajian ideologi dalam pilgub Jabar 2008 pada H. U. *Pikiran Rakyat*. Namun, penelitian tersebut lebih

meneliti tulisan yang sifatnya pemberitaan yang dibuat oleh wartawan surat kabar itu sendiri bukan pada tulisan artikel opini yang dibuat oleh masyarakat umum.

Penelitian yang mengupas wacana di media cetak penting untuk terus dilakukan karena media cetak merupakan media yang strategis, terutama untuk kepentingan propaganda politis. Sebagai pembaca, tentunya kita tidak ingin mencerna mentah-mentah tanpa memilah-milah dulu mana pernyataan yang benar dan yang tidak benar.

Oleh karena itu, peneliti berminat untuk melakukan penelitian menganalisis konteks politisasi bahasa di media cetak dan pemanfaatannya sebagai alternatif bahan ajar pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMA, terutama dalam materi dengan kompetensi dasar memberikan kritik terhadap informasi dari media cetak dan atau elektronik dengan judul penelitian:

"POLITISASI BAHASA PADA ARTIKEL DALAM RUBRIK OPINI KOMPAS SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Bahasa seringkali dikaitkan dengan kekuasaan, dan kekuasaan terkadang melibatkan bahasa sebagai media untuk mempertahankan kekuasaannya. Akhirnya, yang terjadi adalah politisasi bahasa. Politisasi bahasa dilakukan oleh orang atau sekelompok orang untuk menyampaikan informasi dan kepentingannya di media cetak melalui penulisan artikel di rubrik-rubrik opini pada media cetak. Salah satu rubrik opini yang seringkali dijadikan alat penyampaian informasi dan tidak terlepas dari tindakan politisasi bahasa adalah rubrik Opini di *Kompas*.

Dari identifikasi masalah tersebut, peneliti kemukakan batasan dan rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Batasan Masalah Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah penelitian pada penelaahan bagaimana bahasa dalam artikel-artikel yang cetak pada Agustus-Oktober 2010 di rubrik Opini *Kompas* dipolitisasi. Artikel-artikel yang ditelaah, peneliti spesifikasikan hanya pada artikel-artikel yang membahas kinerja dan kebijakan pemerintah.

2. Rumusan Masalah Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti merumuskan masalah penelitian pada hal-hal sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah deskripsi bahasa pada artikel di rubrik Opini *Kompas* yang dimuat bulan Agustus-Oktober 2010?
- b. Bagaimanakah ideologi politik pada artikel di rubrik Opini *Kompas* yang dimuat dalam Agustus-Oktober 2010?

- c. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran analisis kritis pada kelas X-1 MAN 1 Sumedang ?
- d. Apakah hasil penelitian ini representatif sebagai bahan ajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMA/MA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini sebagai berikut.

- a. Mengetahui deskripsi bahasa pada artikel di rubrik Opini *Kompas* yang dimuat bulan Agustus-Oktober 2010.
- b. Mengetahui ideologi politik penulis dalam tulisannya pada artikel di rubrik Opini *Kompas* yang dimuat bulan Agustus-Oktober 2010.
- c. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran analisis kritis di kelas X-1 MAN 1 Sumedang.
- d. Beroleh alternatif bahan ajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMA/MA.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat dijadikan alternatif bahan ajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMA/MA.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran atas istilah-istilah operasional yang ada dalam penelitian ini, maka diperlukan definisi atas istilah-istilah operasional. Berikut ini adalah beberapa definisi operasional tersebut.

1. Politisasi bahasa merupakan konstruksi realitas media yang didalam pemberitaannya terdapat keberpihakan terhadap kepentingan politik, ideologi, dan nilai-nilai yang bertendensi kekuasaan lainnya.
2. Media cetak merupakan media massa sumber informasi masyarakat yang pengungkapannya dicetak dan berupa tulisan-tulisan. Dalam penelitian ini media cetak yang dimaksud berupa koran.
3. Rubrik Opini merupakan salah satu rubrik yang ada dalam media cetak. Dalam rubrik tersebut memuat tulisan-tulisan dari masyarakat umum.
4. Analisis Wacana Kritis merupakan salah satu pendekatan kritis terhadap teks-teks bahasa. Analisis wacana kritis menempatkan teks hanya salah satu bagian di samping kognisi sosial dan konteks.
5. Bahan ajar merupakan bahan atau materi, baik yang tertulis maupun tidak sebagai referensi acuan demi terlaksananya proses pembelajaran.

F. Paradigma Penelitian

Bagan 1.1. Paradigma Penelitian

